

Opini

Rindu Damai di Tanah Lembata

Frano Kleden

(Mahasiswa STFK Ledalero)

Carut-marutnya kondisi Lembata kini telah menjadi sebuah kenyataan yang tak bisa dimungkiri lagi. Ambruknya hukum tergambar jelas di tanah Lembata. Kehidupan bermasyarakat semakin tidak nyaman lagi. Konflik-konflik vertikal yang melibatkan rakyat dengan para pemimpin sering terjadi. Baru-baru ribuan rakyat berdemonstrasi selama dua hari untuk mengusir Bupati Eliaser Yentji Sunur dari tanah Lembata (*FP*, 24/5). Keberanian dan ketegasan rakyat Lembata ini mau mengungkapkan rasa muak dan hilangnya kepercayaan mereka terhadap kepemimpinan Bupati Yance Sunur. Rakyat sudah muak dan kehilangan kesabaran dengan perilaku Bupati yang dinilai sarat akan kebohongan. Rakyat berani mengatakan dugaan kuat bahwa Bupati Yance Sunur berada di balik kehancuran tatanan birokrasi dan politik kemanusiaan di Lembata. Rakyat menduga, Bupati Yance Sunur menggenggam aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim untuk merawat berbagai kasus kejahatan publik yang melibatkannya. Lantas, timbullah pertanyaan: Apakah Bupati Yance sunur itu malaikat? Apakah Bupati Lembata itu kebal hukum di mata polisi dan kejaksan di Lembata sehingga aparat penegak hukum tidak berani menyentuhnya?

Bersama Rakyat Tuntaskan Reformasi

Perjuangan bagi transformasi masyarakat hanya bisa terwujud apabila kita berada di tengah-tengah massa rakyat, hidup dan berjuang bersama mereka. Dalam sejarah gerakan mahasiswa di dunia, kita tentu masih ingat Gerakan Mahasiswa '98 yang hemat saya menjadi “embrio” gerakan-gerakan mahasiswa hingga saat ini. Gerakan ini patut mendapatkan acungan jempol sebab ia tidak hanya bisa memobilisasi jumlah massa yang besar dan berskala nasional, tapi juga bisa menggulingkan sebuah rezim diktator (Orde Baru) yang telah berkuasa hampir 32 tahun di Indonesia. Dalam kurun waktu puluhan tahun, rakyat dibungkam, ditindas hak-haknya dan tidak diberi kesempatan untuk mengartikulasikan keinginannya. Rakyat harus mem-*beo*: menurut program yang dibuat pemerintah meskipun program itu sebenarnya tak dibutuhkan atau tidak memberdayakan rakyat banyak. Saluran aspirasi yang tersumbat itulah yang akhirnya muncrat dalam bentuk aksi massa ketika kotak pandora yang mengekang kebebasan itu terbuka oleh reformasi.

Perjuangan “menggulingkan” pemimpin rakyat kini terjadi di Lembata. Kekecewaan rakyat ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga formal seperti pemerintah (Bupati), polisi, kejaksan ataupun pengadilan mendorong rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam demonstrasi. Proses hukum yang tak jelas juntrungannya terhadap berbagai kasus kejahatan seperti

kasus pembunuhan terhadap Lorens Wadu di mana Bupati ikut terlibat, kematian bocah tak berdosa Alfons Sita di kubangan lubang galian motor Waiara yang merupakan proyek kesenangan Bupati Lembata, kasus pemerasan oleh Bupati Lembata terhadap kontraktor Paulus Lembata membuat rakyat frustrasi dan tak percaya lagi pada proses penegakan hukum di Lembata. Supremasi hukum yang setiap saat dengan rajinnya diucapkan oleh pejabat dan aparat penegak hukum ternyata hanya slogan belaka. Alhasil, masyarakat pun secara langsung menyaksikan bagaimana sejumlah orang mendapat perlakuan khusus dalam hukum. Alasan-alasan ini akhirnya menguatkan hati rakyat untuk berdemonstrasi dua hari untuk mengusir Bupati Eliaser Yentji Sunur dari tanah Lembata.

Lembata ‘tanpa’ Hukum

Hukum di Lembata rupanya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan, kedamaian dan ketenteraman rakyat. Histeria reformasi dalam arti kebebasan orang melakukan apa saja memang sudah sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Namun di Lembata, lemahnya penegakan hukum serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum menjadikan Lembata “rusak” dalam banyak hal. Upaya penegakan hukum selalu terganjal oleh kekuatan tertentu yang tak mau dosa-dosanya di masa lalu terbongkar. Para penegak hukum pun tak berdaya menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan para petinggi dan kroni-kroninya. Mereka nyatanya lebih suka menyelewengkan dan mempermainkan supremasi hukum.

Di negara ini (mungkin juga di Lembata), para pendekar hukum yang piawai mengutak-atik pasal-pasal hukum telah menyulap penjahat menjadi pahlawan dan orang tak berdosa menjadi kriminal. Rasa keadilan rakyat telah dikecewakan habis-habisan oleh berbagai keputusan pengadilan yang “maju tak gentar membela yang bayar”. Hukum dan aparat penegak hukum di Lembata tak lagi berwibawa. Dengan ini, para penegak hukum harus sadar bahwa ketidakberhasilan mereka memenuhi rasa keadilan rakyat ditambah dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang tak kunjung final ditangani, bukan tidak mungkin akan menghilangkan rasa “takut” warga kepada proses penegakan hukum itu sendiri.

Rindu Damai di Tanah Lembata

Ada tiga pemain kunci yang selalu akan menentukan masa depan suatu bangsa, yakni *negara* (eksekutif, legislatif, yudikatif), *civil society* dan *market* (pasar). Ketiga pilar ini harus dapat bekerja secara seimbang dan saling melengkapi. *Negara* bekerja berdasarkan prinsip hukum. Ia punya kekuasaan yang diatur berdasarkan hukum. *Market* mengedepankan prinsip ekonomi. Perusahaan-perusahaan hadir untuk memaksimalkan profit. *Civil society* meliputi LSM, universitas (akademisi), media (pers), agama, lembaga-lembaga moral, organisasi massa dan sebagainya. Ia bekerja berdasarkan prinsip solidaritas. *Civil society* di Lembata yang diwakili oleh Front Lembata Bersih (Rotasi) telah menunjukkan peran positifnya bagi Lembata. Mereka secara sadar dan mandiri melalui demonstrasi telah mengangkat harkat kemanusiaannya dan membangun masyarakatnya ke arah yang mereka cita-citakan bersama. Lalu bagaimana dengan *negara* (baca:

Bupati, polisi, jaksa, hakim) Lembata? Mengapa *civil society* harus melakukan demonstrasi pada mereka?

Secara hakiki, hukum harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Permainan hukum secara sosiologis dapat menciptakan “anomi” yaitu kekaburan yang meluas di kalangan masyarakat tentang “apa yang benar dan apa yang salah”. Anomi adalah penyakit yang amat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena dapat melahirkan suatu disorientasi sistem nilai di kalangan warga masyarakat dan hilangnya kepercayaan pada pranata hukum dan para aparatnya. Jadi, timbulnya aksi demonstrasi oleh *civil society* di Lembata bisa dikatakan sebagai konsekuensi logis dari cacat hukum yang dibuat oleh *negara*, dalam hal ini minoritas elite di tingkat atas (tirani minoritas). Lalu apa yang harus dibuat *negara*?

Pertama, Bupati harus mengupayakan supaya kasus-kasus yang masih ‘gantungan’ dituntaskan dan itu harus dibuktikan betul dengan suatu tindakan konkret. *Kedua*, Bupati harus menata betul-betul institusi-institusi penegak hukum sehingga benar-benar menjadi institusi yang bekerja secara independen. Selain itu Bupati bisa meminta maaf secara publik tentang kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya, daripada menambah lagi kesalahan-kesalahannya di bidang hukum. ‘Politik’ memang menjadikan orang cerdik seperti ular, namun ‘moral’ membuatnya tulus seperti merpati. Mengakui kesalahan dan meminta maaf bukanlah simbol kelemahan pelaku, melainkan simbol orang berjiwa besar, orang yang kuat.

Lalu polisi, hakim dan jaksa sebagai aparat penegak hukum harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mereka adalah perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Dengan demikian, mereka dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih dari itu, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada hukum, ada baiknya jika aparat penegak hukum yang meliputi Bupati, polisi, jaksa dan hakim bertanya kepada hati nuraninya sendiri. Semestinya masih ada perasaan malu pada sesama (jika) ketahuan melakukan penyimpangan. Hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas dan religiusnya. Dengan itu, Bupati yang bijak, polisi yang tegas, jaksa yang cerdas dan hakim yang jujur tentunya dapat melahirkan putusan pengadilan yang adil. Lembata rindu damai.